

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan diperlukan karena peranan pokoknya dalam membentuk generasi mendatang, melalui pendidikan diharapkan dapat dihasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Di dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 tersebut juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan harus dilaksanakan dengan baik mengingat sangat penting artinya bagi kehidupan pribadi siswa maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat merupakan tempat yang memungkinkan seorang siswa untuk meningkatkan pengetahuannya. Pada tahun 1948, *“the Universal Declaration of Human Rights”* telah menetapkan 30

jenis hak dasar manusia yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Ace Suryadi (2009:10) mengungkapkan bahwa pendidikan adalah agen pembangunan dan agen perubahan, tanpa pendidikan tidak akan ada pembangunan yang berarti tidak akan ada perubahan serta pembangunan nasional di masa depan harus menekankan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan untuk mencapai keunggulan bangsa di era keterbukaan dan persaingan global (2002:2). Cicero seorang filsuf Romawi Kuno pun menyatakan kesejahteraan bangsa terletak di dalam karakter warga negara, bahkan sejarawan Arnold Toynbee mengamati dari 21 peradaban penting di dunia 19 telah runtuh bukan dikarenakan penaklukan dari luar tetapi pembusukan moral dari dalam (Lickona 2012:12)

Ginjar Kartasmita (1996) mengungkapkan bahwa suatu bangsa yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja tanpa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sulit menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya negara yang memiliki sumber alam terbatas tetapi sumber daya manusianya berkualitas dapat menjadi negara maju dan mandiri (Endang Danial, 1998:1).

Erry Riyana Harjapamekas (2011) menyebutkan perbedaan antara negara miskin dengan negara kaya tidak bergantung pada usia negaranya ataupun sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan pada pola perilaku atau sikap masyarakatnya yang telah terbentuk bertahun-tahun melalui pendidikan dan budayanya. Perilaku masyarakat di negara maju mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti kejujuran dan integritas, bertanggung jawab, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, menghormati hak orang lain, cinta pada pekerjaan, berusaha keras untuk menabung dan investasi, mau bekerja keras, dan selalu tepat waktu sehingga mengakibatkan keunggulan sikap atau perilaku masyarakatnya yang terbentuk sepanjang sejarahnya melalui kebudayaan dan pendidikan.

Ace Suryadi (2009:11) juga mengungkapkan bahwa bangsa yang melek pendidikan adalah bangsa yang orientasi terpenting dalam hidupnya tertuju pada

dunia pendidikan, sehingga bangsa dengan kultur seperti ini akan mengukur kesuksesan, penghormatan dari prestasi orang dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah masyarakat Jepang sejak dicanangkannya Restorasi Meiji tahun 1880, masyarakat Jepang telah menjadi masyarakat yang begitu menghargai pendidikan yang dampaknya sungguh luar biasa kini Jepang termasuk salah satu negara maju dan berpengaruh di dunia

Hasil survei *Political Economic Risk consultation* (PERC) menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menduduki peringkat 102 dari 106 negara yang disurvei dan satu peringkat di bawah Vietnam. Selain itu, hasil studi *the Third International Mathematic and Science Study-Repeat* (TIMSS-R 1999) melaporkan bahwa siswa SLTP Indonesia menempati peringkat 32 untuk IPA dan 34 untuk Matematika dari 38 negara yang diteliti di Asia, Australia dan Afrika (Olim dan Ali, 2009:351). Sebuah studi kemampuan membaca (*Reading Literacy*) murid sekolah dasar kelas IV pada tahun 1992 menempatkan Indonesia pada urutan ke 29 dari 30 negara (Ace Suryadi, 2009:151). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Terdapat berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam kehidupan para siswa sekarang ini seperti, minat belajar yang rendah, kurangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, keterlibatan siswa dan remaja dalam geng bermotor dan kriminalitas, budaya hedonisme seperti terlihat pada adanya siswa yang berkeliaran di pusat perbelanjaan atau tempat permainan ketangkasan di saat jam pelajaran atau sepulang sekolah, maraknya perkelahian pelajar, penggunaan narkoba dan miras. Berbagai permasalahan tersebut tentunya menjadi catatan buruk di dalam dunia pendidikan kita. Hal ini seperti yang disebutkan Firly Mashita (2012) sebagai beberapa dampak negatif dari Globalisasi terhadap remaja seperti :

1. Gaya hidup kebarat-baratan, budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat pada orang tua, kehidupan bebas remaja dan lain-lain.
2. Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan musyawarah mufakat, dan gotong royong.
3. Semakin sedikit generasi muda yang melestarikan musik, tarian, dan budaya tradisional kita.
4. Remaja mengikuti cara berpakaian yang cenderung tidak memperlihatkan kesopanan.

Dari berbagai pernyataan di atas dapat terlihat sebuah permasalahan dalam kehidupan generasi muda yaitu menurunnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, pendidikan cenderung mengutamakan *hard skill* (pengetahuan dan kemampuan teknis) dan melupakan *soft skill* (kemampuan mengelola diri dan orang lain). Di sisi lain komitmen terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan mulai berkurang seiring dengan meningkatnya egoisme dan individualitas. Dikuatirkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada generasi muda akan hilang, patriotisme dan nasionalisme tidak bertambah seiring dengan umur kemerdekaan bangsa Indonesia.

Budimansyah (2010:5) mengungkapkan beberapa sumber terjadinya perilaku buruk di masyarakat seperti oligarki politik setelah berakhirnya rezim otokrasi orde baru bukannya demokrasi dan adanya kebencian sosial budaya terselubung di masyarakat. Sementara Branson (1999) mengemukakan bahaya dari globalisasi sebagai berikut:

"Globalization and its potential for advancing or inhibiting human right and democracy is more than a subject for debate among academics. This powerfull force is affecting the lives of individuals no matters where in this earth they live."

Dalam pemyataan ini Branson memaknai bahwa globalisasi dengan segala potensinya memungkinkan berkembang atau tertundanya proses demokrasi dan

pemajuan hak azasi manusia lebih sekedar sebagai wacana akademik. Kekuatan yang dahsyat ini akan mempengaruhi kehidupan manusia dimanapun ia hidup.

Mengingat tantangan masa depan ini diperlukan generasi muda yang handal dan mampu bersaing dengan bangsa lain, wahana yang tepat untuk membina sikap mental moral dan karakter siswa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang dikemukakan Dasim Budimansyah (2009:330) bahwa pengembangan peran dan tanggung jawab warga negara melalui media pendidikan dilakukan melalui *Citizenship Education* atau *Civic Education* yang secara operasional didefinisikan sebagai pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk ke dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang berperan penting terhadap pembinaan kedisiplinan siswa di sekolah bertanggung jawab terhadap pembinaan watak dan karakter siswa terutama dalam membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yang memiliki intelegensi tinggi dan berahlak mulia. Hal ini dapat dicermati pada penjelasan pasal 37 ayat (1) UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikemukakan bahwa:

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa.”

Hal ini sesuai dengan pendapat A. Kosasih Djahiri (1985: 19) tentang tri fungsi PKn, yaitu:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek konstitusi/hukum melek pembangunan dan melek permasalahan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Membina pembekalan siswa dan potensi dirinya untuk pembelajaran lebih lanjut.

Menghadapi era globalisasi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswanya, aspek-aspek *civic competences* tersebut diantaranya meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik.

Komponen watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi sosial (*civil society*). Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diwujudkan program-program pendidikan demokrasi agar terjadinya proses pembentukan karakter bangsa, sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah, 2007:195)

Branson (2001) mengemukakan bahwa dalam tingkatan kehidupan orang perorangan sebagai warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki *civics virtues* atau kebajikan-kebajikan warga negara; sebab tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. Inti kebajikan kewarganegaraan adalah tuntunan agar semua warga negara

menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal itu meliputi dua aspek, yaitu: (a) disposisi kewarganegaraan, dan (b) komitmen kewarganegaraan.

Lickona (2012:6) menyebutkan 10 kebajikan yang paling penting untuk membangun karakter kuat meliputi: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, pengendalian diri, cinta, sikap positif, bekerja keras, integritas, bersyukur dan kerendahan hati. Sementara kebajikan warga negara (*civic virtue*) menurut Quigley (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2007:60) diartikan sebagai kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* ini memiliki dua unsur yakni “*civic commitment*” dan “*civic dispositions*”. *Civic dispositions* adalah sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan *civic commitment* adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Dari paparan di atas diharapkan melalui penelitian ini ditemukan adanya pembentukan watak kewarganegaraan siswa di sekolah yang tercipta melalui komitmen sosial siswa di Komplek Sekolah Dasar Sukagalih Barat Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, penelitian ini diharapkan menggugah perhatian seluruh pihak baik siswa, guru, orang tua maupun pihak-pihak lainnya tentang perlunya optimalisasi peranan pendidikan dalam pembangunan nasional sehingga watak kewarganegaraan tidak sebatas wacana tetapi terwujud dalam keseharian siswa baik di lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: “Bagaimana Pembentukan Watak Kewarganegaraan Melalui Komitmen Sosial Siswa” di Komplek Sekolah Dasar Sukagalih Barat Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Oleh karena rumusan masalah tersebut diatas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keadaan komitmen sosial siswa?
2. Bagaimana gambaran keadaan watak kewarganegaraan siswa?
3. Bagaimana pengaruh komitmen sosial siswa dengan watak kewarganegaraan siswa secara khusus (parsial) dan umum (simultan)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan pembentukan watak kewarganegaraan melalui peningkatan komitmen sosial siswa di Komplek Sekolah Dasar Sukagalih Barat Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Secara khusus, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat gambaran komitmen sosial siswa dan watak kewarganegaraan. Mengkaji pengaruh serta melihat signifikansi dan kontribusi komitmen sosial siswa terhadap watak kewarganegaraan siswa di sekolah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para guru dalam upaya meningkatkan efektivitas dan pengembangan pola dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan komitmen sosial dan watak kewarganegaraan siswa.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi ini diharapkan memiliki manfaat dalam menjelaskan keadaan watak kewarganegaraan siswa di sekolah yang tumbuh melalui komitmen sosial. Diharapkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sebuah laboratorium sosial yang menciptakan pembangunan karakter bangsa.

2. Secara Praktis

- a. Berguna bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Program studi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instansi yang mempersiapkan calon

guru Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan merespon tantangan di era global.

- b. Bagi sekolah, kiranya penelitian ini berguna sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa jauh komitmen sosial siswa dapat mempengaruhi watak kewarganegaraan sehingga memberikan kesiapan kepada sekolah dan guru khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk memulai dan menciptakan komitmen sosial dan watak kewarganegaraan siswa, melalui pemahaman strategi pembelajaran maupun substansi pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Bagi pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, semoga penelitian ini berguna sebagai masukan terhadap persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program peningkatan komitmen sosial dan watak kewarganegaraan siswa yang sinergis dengan inovasi komponen sistem pendidikan lainnya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Tesis

Pada penyusunan thesis ini struktur organisasi penulisan yang digunakan mencakup lima bab sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian
- BAB III Metode Penelitian
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
- BAB V Simpulan dan Saran

Bab satu yang merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan kerangka pemikiran yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, klarifikasi konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah, merupakan konsepsi-konsepsi awal yang mengantarkan penulis pada berbagai permasalahan yang harus dipecahkan dalam upaya penulisan thesis ini, termasuk berbagai alasan yang membuat penulis memilih tema thesis ini. Rumusan masalah, merupakan rumusan-rumusan pertanyaan yang disusun penulis untuk membatasi, memudahkan, sekaligus memfokuskan penulisan. Tujuan penulisan, yang mencakup maksud atau sasaran yang hendak dicapai penulis dalam upaya penulisan thesis ini. Metodologi penelitian, merupakan garis besar cara kerja yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan thesis ini. Sistematika penulisan, merupakan susunan dari kegiatan-kegiatan penulisan dan penjelasan secara umum dari masing-masing bagian.

Bab dua merupakan kajian pustaka atau landasan teoritis. Bab ini menguraikan telaahan terhadap berbagai literatur yang akan digunakan dalam penulisan thesis ini. Termasuk di dalamnya juga dapat berupa kajian terhadap teori-teori yang dianggap relevan dalam memberikan penjelasan, pemaknaan dan analisis terhadap masalah yang ada. Pada tahap ini penulis memberikan

pemaparan dan rujukan dari berbagai referensi atau teori yang dianggap relevan dan digunakan dalam penulisan thesis ini.

Bab tiga merupakan metodologi penulisan. Bab ini menguraikan cara kerja yang berisi tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam penyusunan thesis ini. Tahapan-tahapan itu mencakup: proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan bahan kajian. Kemudian, penulisan dan interpretasi yaitu proses menafsirkan untuk ditulis menjadi karya tulis ilmiah. Bagian ini merupakan pemaparan secara terperinci dari garis besar metodologi penelitian digunakan.

Bab empat merupakan pembahasan atau isi, bab ini merupakan penjelasan terhadap aspek-aspek yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi di dalam penelitian ini.

Bab lima merupakan simpulan dan rekomendasi, bab ini berisi interpretasi penulis terhadap temuan-temuan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan thesis ini.